

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



PENINGKATAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN
DAERAH GUNA MENINGKATKAN HARMONISASI HUBUNGAN
PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

DR. H. R. ZULKI ZULFIQRI NOOR, ST., SH., MH., MM

KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XVIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2012



**PENINGKATAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN
DAERAH GUNA MENINGKATKAN HARMONISASI HUBUNGAN
PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh:

DR. H. R. ZULKI ZULKIFLI NOOR, ST., SH., MH., MM

KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XVIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Salam sejahtera bagi kita semua

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur khadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, penulis sebagai salah satu Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVIII telah berhasil menyelesaikan Tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (taskap) dengan judul :

"PENINGKATAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH GUNA MENINGKATKAN HARMONISASI HUBUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Penentuan Tutor dan judul taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor : 396 Tahun 2012, Tanggal 3 Juli 2012, Tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPSA XVIII Lemhannas RI Tahun 2012, dengan thema "Harmonisasi Hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Keutuhan NKRI".

Pada Kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, selaku Gubernur Lemhannas RI, Bapak Letjen TNI Dr. Moeldoko, S.Ip., M.Si, selaku Wakil Gubernur Lemhannas RI, dan Dr. Chandra Manan Mangan, M.Si, selaku Sekretaris Utama Lemhannas RI, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA di Lemhannas tahun 2012. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap ini, yaitu Bapak Prof. Dr. H. Didin S. Damanhuri, SE., MS., DEA, dan Tim Penguji Taskap Bapak Dr. Ardi Partadinata MH., Msi., Bapak Prof. Dr. Miyasto SU., dan Bapak Dr. Panutan S. Sulendrakusuma, SE., MT, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing untuk membuat serta

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

menyelesaikan Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang di keluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari segala kemampuan dan intelektual serta penguasaan di bidang Ketahanan Nasional yang masih terbatas, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya kritikan atau masukan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang barang kali membutuhkannya dalam rangka membahas pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah guna meningkatkan harmonisasi hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 15 Oktober 2012

Dr. H. R. Zulkifli Noor, ST., SH., MH., MM

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. R. Zulkifli Noor, ST., SH., MH., MM

Jabatan : Rektor

Intansi : Universitas Winaya Mukti

Alamat : Jalan Pahlawan No. 69, Bandung

Sebagai peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVIII, Tahun 2012 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk di batalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 15 Oktober 2012

Dr. H. R. Zulkifli Noor, ST., SH., MH., MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Umum	1
2. Maksud Dan Tujuan	6
3. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
4. Metode dan Pendekatan	11
5. Pengertian	12
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	14
6. Umum	14
7. Paradigma Nasional	14
8. Peraturan Perundang-undangan	16
9. Landasan Teori	19
10. Tinjauan Pustaka	25
BAB III KONDISI PEMERATAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH TERHADAP HARMONASI HUBUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEUTUHAN NKRI SAATINI	30
11. Umum	30
12. Pemerataan Pertumbuhan Perekonomian Daerah saat ini	31

13. Implikasi Pemerataan Pertumbuhan Perekonomian Daerah terhadap Harmonisasi Hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Implikasi Peningkatan Harmonisasi Hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Keutuhan NKRI Saat Ini	49
14. Permasalahan yang ditemukan	56
BAB IV PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS	58
15. Umum	58
16. Pengaruh Perkembangan Global	58
17. Pengaruh Perkembangan Regional	60
18. Pengaruh Perkembangan Nasional	63
19. Peluang dan Kendala	66
BAB V KONDISI PEMERATAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG DAPAT MENINGKATKAN HARMONISASI HUBUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEUTUHAN NKRI YANG DIHARAPKAN	68
20. Umum	68
21. Pemerataan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang diharapkan	68
22. Kontribusi Pemerataan Pertumbuhan Perekonomian Daerah terhadap Peningkatan Harmonisasi Hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Kontribusi Peningkatan Harmonisasi Hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Keutuhan NKRI Yang Diharapkan	73
23. Indikator Keberhasilan	79

BAB VI KONSEPSI PENINGKATAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MAMPU MENINGKATKAN HARMONISASI HUBUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEUTUHAN NKRI	81
24. Umum	81
25. Kebijakan	81
26. Strategi	82
27. Upaya	84
BAB VII PENUTUP	93
28. Kesimpulan	93
29. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR LAMPIRAN :	
1. ALUR PIKIR	
2. POLA PIKIR	

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)	32
TABEL 3.2	Sektor Ekonomi dan Indeks Williamson di Indonesia	33
TABEL 3.3	Konsentrasi Sektor-sektor Penyebab Kesenjangan	34
TABEL 3.4	Karakteristik Dasar Ketenagakerjaan Indonesia (1997 a.d 2010)	38
TABEL 3.5	Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing di Indonesia Tahun 2000 – 2009	40

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 Komposisi Lapangan Kerja Tahun 2012 – 2011
(persen) 38

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mewujudkan cita-citanya perlu memiliki pemahaman mengenai geopolitik dan geostrategic. Geopolitik bangsa Indonesia diterjemahkan dalam konsepsi Wawasan Nusantara, sedangkan geostrategic bangsa Indonesia dirumuskan dalam konsepsi Ketahanan Nasional, (SLK Nasional, 1995).

Ketahanan Nasional merupakan salah satu konsepsi politik dari Negara Republik Indonesia. Ketahanan Nasional dapat dikatakan sebagai konsep geostrateginya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, geostrategi bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional, (SLK Nasional, 1995).

Izzato Millati (2009 : 21) menyatakan bahwa geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai suatu pendekatan merupakan salah satu pengertian dari konsepsi ketahanan nasional itu sendiri.

Seiring dengan ketahanan nasional, maka untuk dapat meningkatkan ketahanan nasional, maka salah satu permasalahan yang berkembang diantaranya adalah kecenderungan kurangnya pemerataan pertumbuhan perekonomian daerah yang masih terpusat khususnya di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan pada umumnya terdapat di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan pertumbuhan perekonomian daerah pun tertinggal oleh pertumbuhan perekonomian yang masih terpusat. Untuk menciptakan ketahanan nasional, maka diperlukan pemerataan pertumbuhan perekonomian di daerah sehingga dapat mengurangi ketertinggalan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Sobari. 2010. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah di Indonesia*. Hibah Bersaing DIKTI.
- Arsyad, L., 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ateng Syafrudin, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Azmi. 2012. *Arsip Peta Perbatasan Negara Dan Keutuhan NKRI*. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi Arsip Nasional Republik Indonesia.
- BKPM, BPN. 2009. *Perkembangan Penanaman Modal dalam Negeri dan Modal Asing di Indonesia*.
- CF. Strong, 1966, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson Limited, London.
- Eko Parsojo, 2006, *Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia: Antara Sentripetalisme dan Sentrifugalisme, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap FISIP UI*, Depok.
- Erma Setyowati & Rina Trisnawati. 2003 *Analisis Potensi Daerah untuk Pengembangan Wilayah di Eks-Karesidenan Surakarta Menggunakan Teori Pusat pertumbuhan*.
- Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*, New York Russell & Russell.
- Husein Umar. 1999. *Riset Bisnis dan Perilaku Konsumen*. Gramedia. Jakarta.
- Inriyanto. 2002. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Fikri Thalib, 4 Desember.
- Izzato Millati. 2009. *China Dan Jepang Dalam Sengketa Teritorial Kepulauan Senkaku (1970-2006)*. Universitas Muhammadiyah. Yogjakarta.
- Jhingan, M L, 1993, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

- Junaidi. 2010. *Pemerataan Pertumbuhan Perekonomian Daerah.* <http://junaidichaniago.com/category/artikel>.
- Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Piskal, 2012.
- Koswara. 1999. *Pengembangan Motivasi Berwirausaha dan Cara Mengenai Peluang Usaha.* Modul 3. UG.
- Kuncoro Thesaurianto. 2007. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kemandirian Daerah.* Artikel.
- Laporan BPS. 2012 Struktur Ekonomi Indonesia.
- Lemhanas. 2000. *Asas Ketahanan Nasional.* Jakarta.
- Lili Masli. 2007. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat.*
- Magnar, Kuntana. 2009, *Bahan diskusi pada Diskusi Terbatas Pusat Studi Hukum Tata Negara,* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 4 Agustus 2009
- Maman. 2002. *Metode Penelitian.* Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Mankiw, Gregory N, 2004, *Principles of Economics,* (terjemahan), Salemba Empat, Jakarta
- Moch. Rum Alim. 2008. Partisipasi Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Politik Volume 4/No.1*
- Nurzaman, Siti Sutriah. 1997. Tinjauan Kesenjangan Wilayah di Indonesia. *Jurnal PWK Vol. 8, 4 / Desember 1997.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
- Revrosind Baswir. 2007. Kesenjangan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.* Indonesia.
- Saggaf. 1999. *Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah.* Salemba Empat. Jakarta.
- Saldi Isra, 2005, **The Law-Making Process in Reformasi Indonesia**, Makalah Disampaikan dalam Seminar INDIRA Project di The Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law of Leiden University, 21-22 Maret.

Saldi Isra, 2006a, **Mengelola Otonomi Khusus**, dalam *Kompas*, 22 Februari.

Saldi Isra, 2006b, **Fajar Baru Otonomi Khusus**, dalam *Kompas*, 13 Juli, Jakarta.

SLK Nasional, 1995. *Ketahanan Nasional*. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/371/jbptunikompp-gdl-sylviaocta-18526-7-ketahanan.l.doc>.

Sudarsono Hardjosoeokarto. 2008. *Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sugiyanto (2010). *Penelitian Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamandau*.

Syafrudin, Ateng,. Pengaturan Koordinasi di Daerah, PT Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1993.

Todaro, Michael P, 2003, *Economic Development*, Eight Edition, Pearson Education Limited, Eidenburg Gate, Harlow, Essex, England.

Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999.

Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

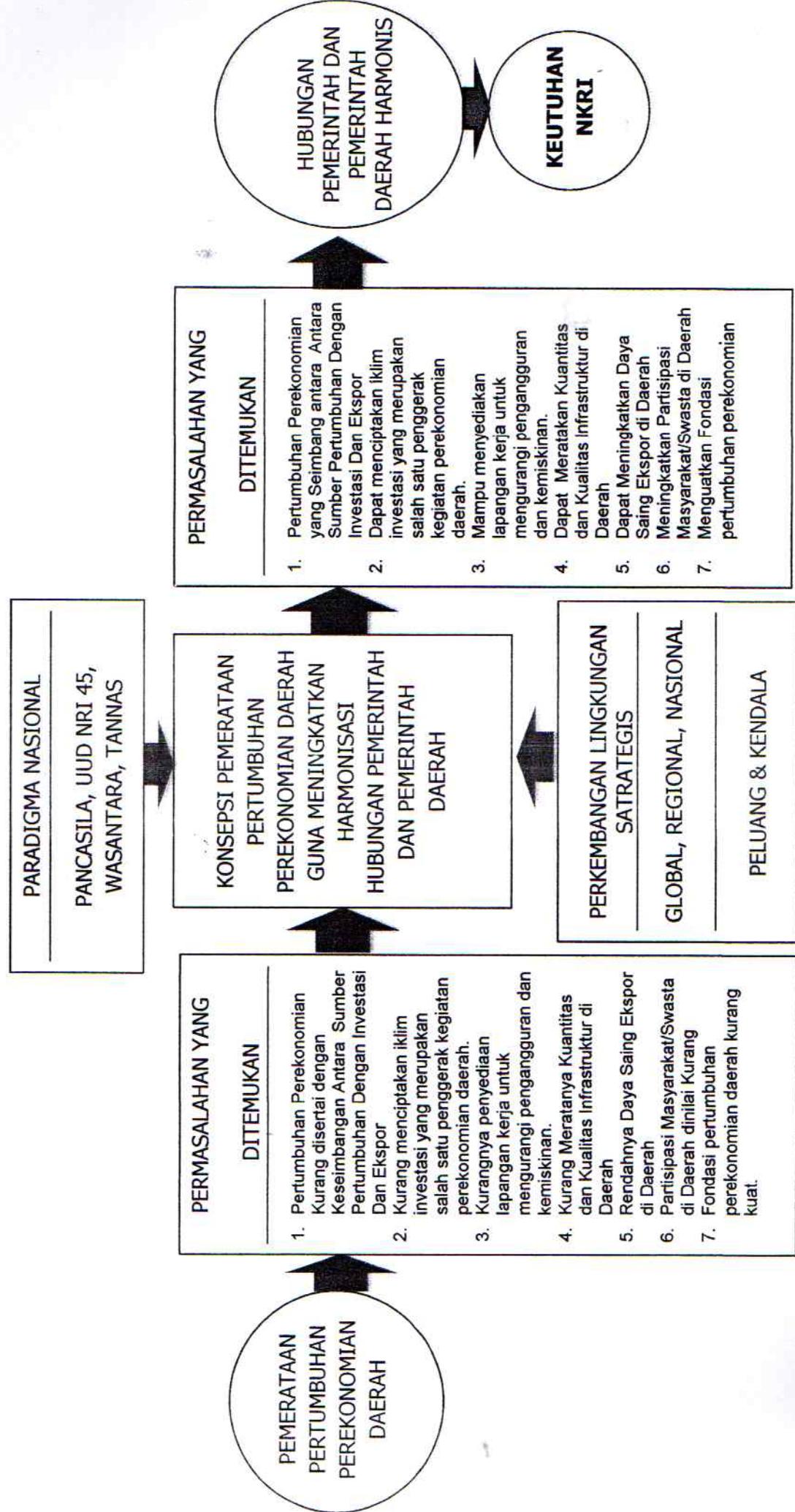
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009

Vredenbregt. 1987. *Research Methodology*. Irwin.inc. Germant.

Wong, John, 1982. *Ekonomi ASEAN : Prospek Pembangunan Dasawarsa 1980-an*, Jakarta : Bina Aksara.

ALUR PIKIR

PENINGKATAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH GUNA MENINGKATKAN HARMONISASI HUBUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA KEUTUHAN NKRI



POLA PIKIR

PENINGKATAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH GUNA MENINGKATKAN HARMONISASI HUBUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA KEUTUHAN NKRI

PARADIGMA NASIONAL (PANCASILA,
UUD NRI 45, WASANTARA, TANNAS)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



S	O	M
SUPRA STRUKTUR	UNDANG-UNDANG KEPRES	REGULASI IMPLEMENTASI, SINKRONISASI, EVALUASI
INFRA STRUKTUR	OPERASIONAL PEMERINTAH DPR, DPRD PEMERINTAH DAERAH DAN APBN	KOORDINASI PENGAWASAN PENGENDALIAN POLITICAL WILL
SUB STRUKTUR	MASYARAKAT	EDUKASI PEMBERDAYAAN PENGAWASAN



PEMERATAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH SAAT INI

PEMERATAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG DIHARAPKAN

HUBUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH HARMONIS

KEUTUHAN NKRI

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN SATRATEGIS
GLOBAL
REGIONAL
NASIONAL
PELUANG & KENDALA